

KURIKULUM BERBASIS KOMPETENSI DALAM REFORMASI PENDIDIKAN

ABSTRAK

Reformasi pendidikan terjadi sejalan dengan perubahan budaya kehidupan, terjadi pada skala global maupun regional. Perubahan di bidang pendidikan dapat berjalan dengan adanya kurikulum yang dapat mengakomodasi perubahan-perubahan yang terjadi. Kurikulum Berbasis Kompetensi merupakan salah satu alternatif jawaban terhadap tuntutan adanya perubahan berkenaan dengan globalisasi, desentralisasi pendidikan, dan kebutuhan diversifikasi kurikulum bertujuan mempersiapkan peserta didik memiliki kemampuan intelektual, emosional, spiritual, dan sosial yang bermutu tinggi.

Pengembangan KBK memuat : pengelolaan kurikulum berbasis sekolah, kurikulum dan hasil belajar, kegiatan belajar mengajar, dan penilaian berbasis kelas. Sedangkan implementasi kurikulum berbasis kompetensi menempatkan siswa sebagai subjek belajar (*Student Oriented*), selaras dengan empat pilar dari rumusan *Commision on Education for the twenty – first Century* kepada Unesco yaitu (1) *Learning to know*, (2) *Learning to do*, (3) *learning to be*, (4) *learning to live together*.

Kata Kunci : *Reformasi pendidikan, KBK, pengembangan, implementasi*

A. PENDAHULUAN

Kehidupan masyarakat yang terus menerus mengalami perubahan sebagai akibat dari kemajuan IPTEK menuntut pendidikan pada jenjang persekolahan harus menyesuaikan dan mengantisipasi setiap perubahan yang terjadi. Materi dan pengalaman belajar yang diberikan di sekolah harus bermanfaat untuk bekal kehidupan peserta didik. Perubahan-perubahan tersebut bukan hanya menuntut perbaikan kualitas, akan tetapi juga perlu penyesuaian kurikulum. Kurikulum yang bersifat *content oriented* dan berisi materi pelajaran yang bersifat fakta lepas-lepas perlu direvisi. Revisi atau perubahan tersebut diarahkan pada proses pendidikan yang lebih berorientasi kepada penyediaan bagi peserta didik kompetensi-kompetensi yang berguna bagi kehidupannya.

Pendidikan adalah salah satu bentuk perwujudan kebudayaan manusia yang dinamis dan sarat perkembangan, karena itu perubahan atau perkembangan pendidikan adalah hal yang memang seharusnya terjadi sejalan dengan perubahan budaya kehidupan. Perubahan dalam arti perbaikan pendidikan pada semua tingkat perlu terus menerus dilakukan sebagai antisipasi kepentingan masa depan. Pemikiran ini mengandung konsekuensi bahwa penyempurnaan atau perbaikan pendidikan untuk mengantisipasi kebutuhan dan tantangan masa depan perlu terus-menerus dilakukan, diselaraskan dengan perkembangan kebutuhan dunia usaha/dunia industri, perkembangan dunia kerja, serta perkembangan IPTEK.

Perubahan di bidang pendidikan tidak akan berjalan tanpa adanya kurikulum yang dapat mengakomodasi perubahan yang terjadi itu. Konsep kurikulum yang meliputi landasan, program, pelaksanaan, penilaian dan pengembangan kurikulum perlu dipahami oleh semua pihak yang terkait dalam pelaksanaan proses pembelajaran di sekolah mulai dari kepala sekolah, guru-guru, tenaga administrasi, bahkan oleh peserta didik. Tujuan pendidikan berupa tujuan institusional, yang memberi arah dalam implementasi kurikulum, harus betul-betul dipahami oleh guru sebagai ujung tombak dalam pelaksanaan kurikulum. Guru juga harus memahami rumusan tujuan kurikuler dan mata pelajaran yang menjadi tanggung jawabnya, memahami materi-materi pokok yang harus diajarkannya juga menguasai tentang bagaimana cara menyampaikan kepada siswa serta menguasai prosedur dan teknik evaluasi hasil belajar.

Kurikulum berbasis kompetensi merupakan upaya untuk mempersiapkan peserta didik memiliki kemampuan intelektual, emosional, spiritual, dan sosial yang bermutu tinggi. Kompetensi yang dikembangkan adalah keterampilan dan keahlian/kecakapan

menghadapi perubahan, pertentangan, ketidakmenentuan, ketidakpastian, dan kompleksitas dalam kehidupan.

B. PEMBAHASAN

a. Desentralisasi Pendidikan

Desentralisasi dalam sektor pendidikan merupakan konsekuensi dari pemberlakuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang kewenangan daerah. Struktur pemerintah menurut UU Nomor 22 Tahun 1999 pasal 1 dan 2 adalah Pemerintah Pusat dan Daerah Otonom. Daerah Otonom terdiri atas daerah Propinsi, Kabupaten, dan Kota. Masing-masing berdiri sendiri dan tidak memiliki hubungan hierarki satu sama lain, tetapi memiliki hubungan koordinasi dan kerjasama kemitraan. Penyelenggaraan otonomi daerah tetap dilaksanakan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut pasal 11 UU Nomor 22 Tahun 1999, pendidikan termasuk bidang kewenangan yang diberikan kepada daerah, dan termasuk bidang pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh daerah kabupaten/kota. Menurut pasal 3 dan 4 PP Nomor 25 Tahun 2000, kecuali penyelenggaraan Sekolah Luar Biasa dan Penataran Guru, penyelenggaraan Pendidikan Dasar sepenuhnya menjadi tanggung jawab daerah kabupaten/kota. Tugas pemerintah, menurut pasal 2 ayat 3 butir 11 PP Nomor 25 Tahun 2000 lebih banyak pada penyusunan perencanaan nasional dan pengendaliannya, penetapan berbagai standar dan persyaratan, serta penetapan kalender pendidikan dan jumlah jam belajar efektif pertahun. Di luar ketentuan tersebut, seluruhnya menjadi kewenangan yang wajib dilaksanakan oleh daerah kabupaten/kota.

Kewenangan propinsi di bidang pendidikan menurut PP Nomor 25 Tahun 2000 adalah sebagai berikut: (1) penetapan kebijakan tentang penerimaan siswa dan mahasiswa dari masyarakat minoritas, terbelakang, dan/atau tidak mampu; (2) penyelenggaraan sekolah luar biasa; (3) penyediaan bantuan pengadaan buku pelajaran pokok/modul pendidikan untuk TK, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan luar sekolah; (4) penyelenggaraan balai pelatihan dan/atau penataran guru; (5) mendukung/membantu penyelenggaraan pendidikan tinggi selain pengaturan kurikulum, akreditasi dan pengangkatan tenaga akademis; dan (6) pertimbangan pembukaan dan penutupan perguruan tinggi.

Kewenangan daerah kabupaten/kota di bidang pendidikan menurut PP Nomor 25 Tahun 2000 adalah sebagai berikut: (1) menyusun dan menetapkan petunjuk

pelaksanaan pengelolaan TK, SD, SLTP, SMU, dan SMK berdasarkan pedoman yang ditetapkan pemerintah; (2) menetapkan kurikulum muatan lokal SD, SLTP, SMU, dan SMK berdasarkan kurikulum nasional yang ditetapkan pemerintah; (3) melaksanakan kurikulum nasional berdasarkan pedoman yang ditetapkan pemerintah; (4) mengembangkan standar kompetensi siswa TK, SD, SLTP, SMU, dan SMK atas dasar minimal kompetensi yang ditetapkan pemerintah; (5) memantau, mengendalikan, dan menilai pelaksanaan pembelajaran dan manajemen sekolah; dan (6) menetapkan petunjuk pelaksanaan penilaian hasil belajar TK, SD, SLTP, SMU, dan SMK berdasarkan pedoman yang ditetapkan pemerintah.

Pelibatan masyarakat dalam desentralisasi pendidikan merupakan masalah yang dihadapi. Hal ini disebabkan selama ini sekolah merupakan institusi yang berdiri di luar institusi masyarakat. Dengan kata lain, sekolah merupakan tanggung jawab pemerintah, bukan tanggung jawab masyarakat, sehingga jika orang tua menyekolahkan anaknya maka ia tidak lagi memiliki tanggung jawab atas sekolah yang dimaksudkan. Selama ini pelibatan masyarakat hanya sebatas menjadi anggota BP3, itu pun sebatas pemberian iuran yang besarnya sangat terbatas. Keadaan ini akan menyulitkan penyelenggara pendidikan dalam hal pelibatan masyarakat terhadap pengelolaan pendidikan. Hal yang seyogyanya dilakukan adalah melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan sejak awal, terutama dalam kaitannya dengan pelaksanaan layanan jasa pendidikan. Selain itu, manajemen berbasis sekolah dan masyarakat dalam hal ini harus lebih dikembangkan dalam penyelenggaraan pendidikan di daerah.

Desentralisasi pendidikan menawarkan suatu model pengelolaan yang dikenal dengan *School Based Management* (SBM). SBM pada dasarnya model pengelolaan sekolah dengan mendorong partisipasi masyarakat dalam menentukan keputusan-keputusan sekolah (Rizpi dan Lingard, 1992). Keputusan-keputusan tersebut bisa menyangkut penentuan pimpinan sekolah maupun penentuan kebijakan-kebijakan yang berhubungan dengan penentuan materi dan model kurikulum yang dianggap sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta penentuan sumber dan strategi pendanaan dan pembiayaan sekolah.

b. Diversifikasi Kurikulum

Otonomi daerah dalam penyelenggaraan pendidikan memberikan implikasi terhadap masing-masing daerah untuk mengembangkan pendidikan sesuai dengan potensi dan karakteristik yang dimiliki. Dengan demikian, akan terdapat variasi baik

pengelolaan maupun perolehan pendidikan pada masing-masing daerah, karena perbedaan yang dimiliki tersebut. Kurikulum yang konvensional, dalam arti terpusat, yang berlaku untuk semua daerah dan lapisan masyarakat tampaknya sudah tidak relevan lagi. Keadaan ini memberikan konsekuensi terhadap perubahan paradigma tentang kurikulum sekolah. Diperlukan suatu kurikulum yang dapat mengakomodasi semua potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah. Selain itu, dalam wacana globalisasi, memacu antara penyelenggara pendidikan untuk mengembangkan kompetensi yang spesifik sesuai dengan tuntutan untuk memiliki daya saing internasional. Meskipun, untuk beberapa kalangan dinilai kontroversial, hal ini sudah terjadi, karena masyarakat menginginkan anak-anaknya memiliki kemampuan yang bersifat kompetitif diantara persaingan global. Hal ini menyebabkan dalam pelaksanaannya tidak dapat lagi mengikuti acuan kurikulum yang konvensional yang tidak dapat mengembangkan siswa untuk berpacu dalam arena wawasan global.

Kurikulum berdiversifikasi adalah suatu bentuk kurikulum yang memberi kesempatan kepada setiap sekolah untuk memiliki ciri khas dan pusat keunggulan masing-masing dan dalam pelayanan pendidikannya juga memberi kesempatan kepada siswa yang memiliki bakat dan kemampuan tertentu untuk mengembangkannya secara optimal. Bentuk kurikulum ini merupakan salah satu jalan keluar yang efektif untuk mengatasi mutu dan relevansi pendidikan. Melalui kurikulum berdiversifikasi semua potensi daerah dan peserta didik diakomodasi. Dengan demikian sekolah selain bisa melaksanakan kurikulum sesuai dengan tuntutan minimal yang bersifat nasional, juga setiap sekolah diberi kesempatan untuk mengembangkan materi-materi yang sesuai dengan kebutuhan siswa dan masyarakat.

Bentuk kurikulum ini tidak hanya dapat mengakomodasi keadaan sekolah di daerah dengan segala permasalahan yang ada, melainkan juga dapat mengakomodasi penyelenggaraan pendidikan yang bertujuan untuk mengembangkan kemampuan yang bersifat kompetitif dalam skala global. Meskipun tidak boleh menyimpang dari kompetensi minimal yang ditetapkan kurikulum nasional, setiap daerah atau pun sekolah dapat mengembangkan *core content* dan pusat unggulan sebagai ciri khas yang dapat dijadikan nilai jual bagi masing-masing daerah atau sekolah yang bersangkutan. Oleh karena itu, peran kepala sekolah sebagai manajer sangat menentukan. Kualifikasi kepala sekolah, melibatkan masyarakat, dan fokus unggulan merupakan hal yang strategis dalam pengembangan kurikulum berdiversifikasi.

c. Pendidikan dalam Era Globalisasi

Globalisasi membawa dampak terhadap dunia pendidikan, terutama sebagai suatu wahana mempersiapkan SDM yang mampu mengendalikan dan memanfaatkan perubahan-perubahan yang diakibatkan oleh proses globalisasi itu. Pendidikan menyiapkan peserta didik dengan kompetensi-kompetensi yang diperlukan bagi kehidupan, seperti kompetensi keagamaan, akademik, ekonomik, dan sosial-pribadi. Kompetensi keagamaan diperlukan untuk menjalankan fungsi manusia sebagai hamba Tuhan Yang Mahakuasa dalam kehidupan sehari-hari. Kompetensi akademik diperlukan untuk dapat mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan jenjangnya. Kompetensi ekonomik diperlukan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi agar dapat hidup layak di masyarakat. Kompetensi sosial pribadi diperlukan untuk dapat hidup adaptif sebagai warga Negara dan warga dunia.

Pendidikan pada era globalisasi seharusnya berkaitan dengan: (1) pemahaman mengenai budaya silang yang berarti mengakui keberadaan lebih dari satu sudut pandang dan belajar melihat dunia dari perspektif yang berbeda, (2) pembelajaran holistik yang membawa berbagai disiplin ke suatu isu besar dan meliputi berbagai pendekatan dalam pembelajaran, dan (3) pelibatan potensi masyarakat yang dapat menjalin hubungan yang akrab dan utama antara lingkungan masyarakat dengan sekolah. Dalam kaitannya dengan pengembangan kurikulum, ada beberapa hal yang dapat dilakukan, yaitu: (1) pendekatan studi yang berorientasi dunia dengan cara integratif untuk memahami dunia, (2) fokus terhadap dunia dalam performance sejarah yang menyerap perspektif dunia secara komprehensif, (3) pendidikan sebagai landasan pengembangan ekonomi dalam arti komponen utama dari daya saing ekonomi adalah daya saing pendidikan, (4) fokus terhadap pendekatan interdisipliner untuk meningkatkan pemahaman terhadap isu-isu utama dalam mengintegrasikan perspektif internasional, dan (6) pelaksanaan *cooperative learning* untuk memahami peningkatan pluralistik dalam masyarakat.

Makna pendidikan era globalisasi dalam konteksnya, jika dilihat dan dibandingkan dengan beberapa negara lain memiliki kesesuaian-kesesuaian dalam pengembangan kurikulumnya. Australia, masalah kurikulum yang krusial dalam sistem pendidikan Australia terlelak terutama pada isi kurikulum (*curriculum content*), yaitu menentukan isi kurikulum yang cocok untuk masyarakat. Hal ini timbul disebabkan oleh perubahan yang terjadi dalam masyarakat Australia dan komposisi penduduk. Lebih sulit memperoleh kesepakatan tentang isi kurikulum saat ini dibandingkan dengan masa

sebelumnya karena masyarakat Australia yang semakin pluralistik dan sekaligus multikultural. Tidak diketahui dengan pasti bagaimana bentuk masyarakat Australia di masa datang. Kesulitan ini makin lebih terasa pada tingkat pendidikan menengah karena kurikulum akademik yang harus dipersiapkan bagi siswa yang akan terus ke pendidikan tinggi; ini dipandang oleh sebagian ahli sebagai yang tidak tepat untuk banyak siswa.

Kurikulum pendidikan Korea Selatan dan Jepang secara filosofis memiliki kesamaan, yaitu berangkat dari perpaduan antara akar *progressivisme* dan *interaksionalisme*. Ciri-ciri menonjol yang dapat disebut adalah, dengan *progressivisme*, kurikulum Korea dan Jepang berorientasi ke masa sekarang; mengembangkan bakat dan potensi peserta didik; menekankan pembentukan pribadi (karakter); guru menjadi pembimbing, motivator dan fasilitator (*Shido*) dalam '*learning by doing*'. Demikian juga dengan *interaksionalisme* (rekonstruksi sosial), kurikulum Korea dan Jepang dapat dirunut dari ciri-ciri: berorientasi ke masa lalu dan yang akan datang; mengajarkan kebersamaan (*connection*); serta menekankan pemecahan masalah kehidupan (masyarakat). Selain itu teori kurikulum Korea Selatan dan Jepang adalah berakar pada teori *humanistik* dan *rekonstruksi sosial*. Ciri penerapan teori kurikulum tersebut dapat dilihat misalnya dalam prinsip: *student centred*; proses pembelajaran secara *inkuiri-diskaveri*, dan pemecahan masalah masyarakat; kebersamaan dalam belajar (*connection and cooperative learning*).

Korea Selatan dan Jepang sama-sama mengembangkan dan menerapkan kurikulum yang dikelola secara nasional (*Line Staff Models*) . Namun tanggung jawab terakhir perencanaan kurikulum dibebankan pada kepala sekolah, dan pelaksanaan kurikulum dilakukan melalui kerjasama semua staf pengajar.

Malaysia, pendekatan dalam perencanaan kurikulum adalah terintegrasi. Elemen-elemen pengetahuan, keterampilan dan nilai-nilai digabungkan untuk perkembangan atas aspek intelektual, spiritual, emosional dan fisik individu.

Canada, pendekatan kurikulum lebih memantapkan atau meredefinisikan isi kurikulum inti (*core curriculum*) dengan memasukkan mata pelajaran yang bersifat akademik wajib, terutama matematika, sains, bahasa, dan bidang ilmu-ilmu sosial (sejarah dan geografi). Selain itu ditambahkan pula teknologi komputer, berpikir kreatif, belajar mandiri, dan pendidikan lingkungan.

NIER (1999) mengungkapkan bahwa dalam model pengembangan model dan organisasi kurikulum secara umum ada dua pendekatan yang dianut oleh banyak negara, yaitu : (i) *content atau topic based approach* , dan (ii) *outcome based approach*. (iii) *gabungan antara satu dan dua*.

Content atau topic based approach, yaitu merinci daftar topik atau masalah yang akan dibahas, kemudian disusun sebagai bentuk mata pelajaran yang akan diberikan di sekolah. *Outcome based approach*, yaitu pendekatan yang dianut dalam menyusun materi berdasarkan outcome, atau kompetensi apa yang diharapkan dicapai oleh siswa dalam kurun waktu tertentu dalam jenjang persekolahan yang diikutinya.

Tabel 1 : Model Pengembangan Kurikulum antarnegara

Nomor	Nama Negara	Pendekatan
1.	Australia	<i>outcome/competency based</i>
2.	China	<i>content based</i>
3.	Fiji	<i>content based</i>
4.	Germany (Bavaria)	<i>gabungan keduanya</i>
5.	India	<i>content based dan, outcome/competency based</i>
6.	<i>Indonesia</i>	<i>outcome/competency based</i>
7.	Jepang	<i>content based</i>
8.	Malaysia	<i>gabungan keduanya</i>
9.	Selandia Baru	<i>outcome/competency based</i>
10.	USA (New York State)	<i>gabungan keduanya</i>

(Sumber : NIER , 1999)

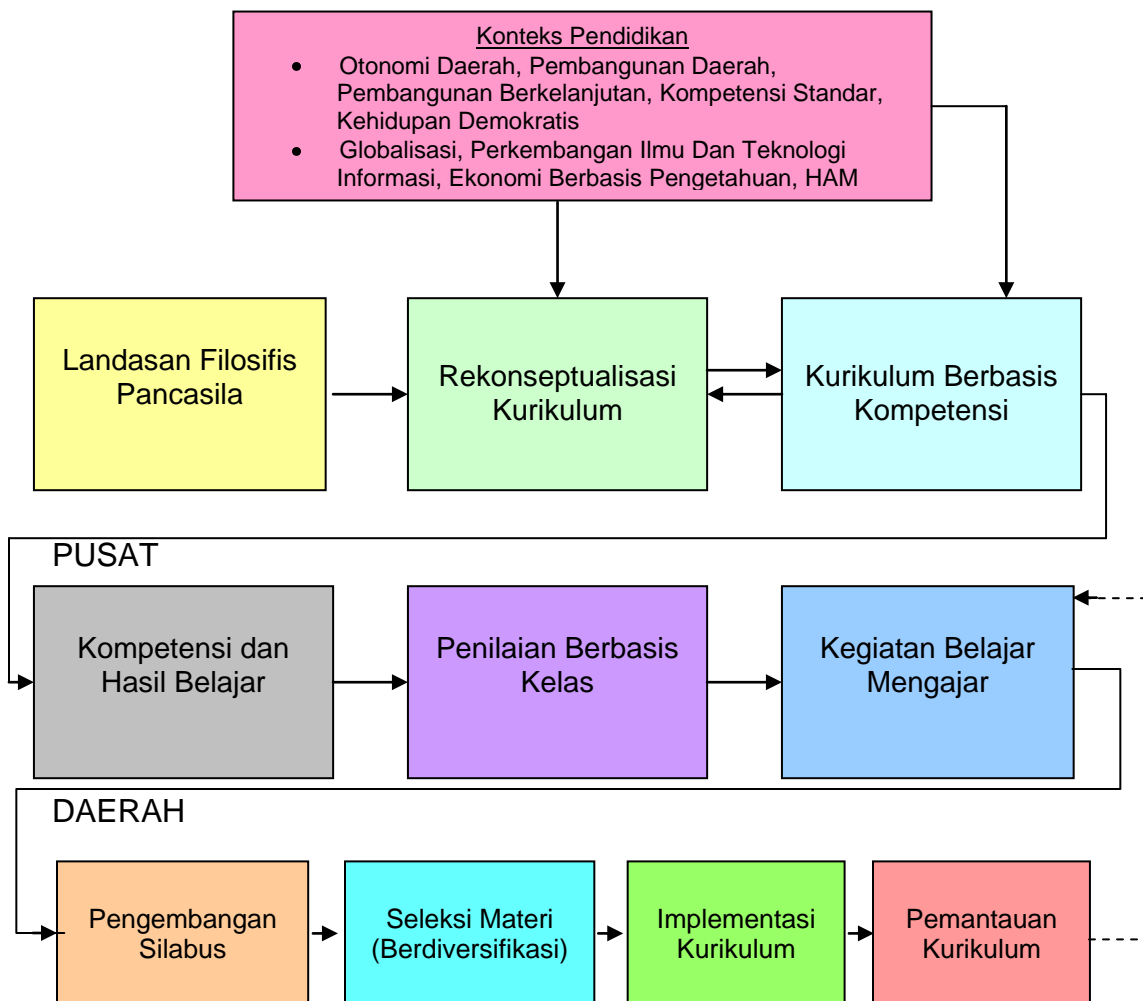
2. Pengembangan KBK

Kurikulum Berbasis Kompetensi terdiri atas empat komponen utama, yang meliputi: Pengelolaan Kurikulum Berbasis Sekolah, Kurikulum dan Hasil Belajar, Kegiatan Belajar Mengajar, dan Penilaian Berbasis Kelas. Keempat komponen utama ini merupakan suatu kesatuan yang menggambarkan seluruh rangkaian yang perlu dikembangkan dalam pengembangan KBK.

a. Pengelolaan Kurikulum Berbasis Sekolah

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom menuntut perubahan dalam pengelolaan pendidikan dari yang bersifat sentralistik menjadi desentralistik. Hal ini menuntut pula pola pengembangan kurikulum dari yang bersifat sentralistik (dikembangkan oleh pusat) kepada upaya pemberdayaan daerah dan sekolah dalam pengelolaan pendidikan termasuk di dalamnya pengembangan kurikulumnya (silabus) yang bersifat desentralistik.

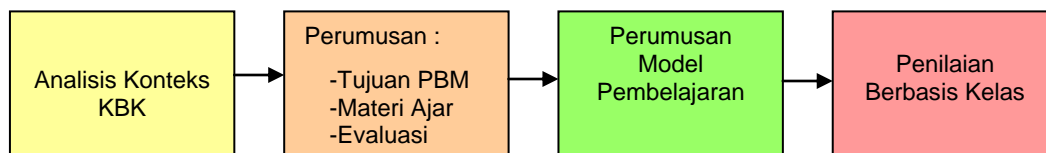
Kedudukan pengelolaan kurikulum berbasis sekolah dalam pengembangan sistem kurikulum nasional dapat dilihat bagan berikut ini :



Bagan 1. Pengelolaan Kurikulum Berbasis Sekolah

Bagan di atas menunjukkan pembagian tugas pengelolaan dan pengembangan Kurikulum Berbasis Kompetensi. Pada tingkat pusat dikembangkan : *Pertama*, kompetensi dasar dan hasil-hasil belajar yang akan dicapai. *Kedua*, kerangka penilaian berbasis kelas. *Ketiga*, desain kurikulum berbasis kompetensi. Sedangkan di tingkat daerah dimana peran dan tanggungjawab sekolah (kepala sekolah, guru dll) sangat besar dalam pengembangan kurikulum berbasis kompetensi terutama berkaitan dengan pengembangan silabus, penseleksian materi yang sesuai dengan kondisi sekolah, pengimplementasian, dan pemantauan pelaksanaan kurikulum secara riil di lapangan.

Pengembangan kurikulum berbasis kompetensi menuntut adanya tim yang bertugas menyusun silabus, seleksi isi, dan menentukan strategi belajar mengajar yang sesuai dan memantau pelaksanaannya. Adapun langkah-langkah dalam pengembangan kurikulum/silabus berbasis kompetensi dapat dilihat pada bagan berikut ini :



Bagan 2. Langkah-Langkah Pengembangan Silabus

b. Kurikulum dan Hasil Belajar

Kurikulum dan Hasil Belajar (KHB) merupakan salah satu komponen Kurikulum Berbasis Kompetensi secara umum memuat perencanaan pengembangan kompetensi peserta didik yang perlu dicapai secara keseluruhan sejak lahir sampai usia 18 tahun. Dalam KHB dimuat rumusan-rumusan kompetensi, hasil belajar dan indikator-indikator dari hasil belajar sejak dari Taman Kanak-Kanak dan Raudhatul Athfal (TK & RA) sampai dengan kelas 12 (SMA & MA).

Pengembangan kompetensi dan hasil belajar melalui penyusunan silabus dan perencanaan pembelajaran di sekolah mengacu kepada prinsip-prinsip sebagai berikut : Pertama, Keimanan, nilai, dan Budi pekerti luhur. Kedua, Keseimbangan etika, logika, estetika, dan kinestika. Ketiga, Kesamaan memperoleh kesempatan. Keempat, Penguatan integritas nasional. Kelima, Pengembangan sains dan teknologi informasi. Keenam, Pengembangan keterampilan hidup. Ketujuh, Belajar sepanjang hayat. Kedelapan, berpusat pada anak dengan penilaian berkelanjutan dan komprehensif. Kesembilan, pendekatan menyeluruh dan kemitraan.

Pengembangan KHB bertolak dari tiga rumpun pengembangan untuk TK & RA dan sebelas rumpun pelajaran untuk SD/MI sampai dengan SMA & MA. Tiga rumpun pengembangan mencakup : *Pertama*, Rumpun pengembangan moral. *Kedua*, Rumpun pengembangan kemampuan dasar, meliputi : perkembangan fisik, bahasa, kognitif dan pra-akademik. *Ketiga*, Rumpun pengembangan sosial dan emosional. Sedangkan sebelas rumpun pelajaran adalah : Pendidikan Agama, Kewarganegaraan, Bahasa Indonesia, Matematika, Sains, Ilmu Sosial, Bahasa Inggris dan Bahasa Asing lainnya, Kesenian, Pendidikan Jasmani, Keterampilan dan Teknologi Informasi dan Komunikasi.

Setiap rumpun pengembangan dan pelajaran diatur dalam aspek/sub-aspek, kemudian setiap aspek ditetapkan penekanan atau fokus hasil pembelajaran dari yang konkret ke abstrak, mudah ke sulit, sederhana ke suatu yang kompleks. Fokus hasil belajar disajikan dalam bentuk peta hasil belajar. Sedangkan dalam pengembangan materi pembelajaran berpedoman pada standar hasil belajar yang terdapat dalam KHB yang telah dirumuskan secara jelas, mudah dimengerti yang mengandung informasi tentang kinerja siswa. Standar terdiri dari dua elemen yang berkaitan yang disajikan dalam bentuk tabel dua kolom, yaitu kolom hasil belajar dan kolom indikator.

Kurikulum dan hasil belajar (KHB) disusun merujuk kepada tujuan pendidikan nasional yang tercantum dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional BAB II pasal 3 yang berbunyi : “Pendidikan nasional bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab”.

Dalam Kurikulum Berbasis Kompetensi terdapat Istilah : Kompetensi Tamatan dan Kompetensi Lintas Kurikulum. Kompetensi Tamatan adalah pengetahuan, keterampilan, sikap dan nilai-nilai yang direfleksikan dalam kebiasaan berfikir dan bertindak setelah siswa menyelesaikan suatu jenjang tertentu. Sedangkan Kompetensi Lintas Kurikulum adalah kecakapan yang dicapai siswa melalui lintas rumpun pelajaran yang ada di dalam kurikulum. Dalam Kurikulum dan hasil belajar dirumuskan sembilan Kompetensi Lintas Kurikulum (KLK) yang diharapkan dicapai setelah siswa menamatkan pendidikan dasar dan menengah. Kompetensi-kompetensi tersebut adalah :

- 1) Siswa sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa menyadari bahwa setiap orang mempunyai hak untuk dihargai dan merasa aman. Dalam hal ini siswa memahami hak-hak dan kewajibannya serta menjalankannya secara bertanggung jawab.

- 2) Siswa dapat menggunakan bahasa yang komunikatif untuk memahami, mengembangkan dan mengkomunikasikan gagasan dan informasi, serta untuk berinteraksi dengan orang lain.
- 3) Siswa mampu memilih, memadukan, dan menerapkan konsep-konsep dan teknik-teknik numerik dan spasial, serta mampu mencari dan menyusun pola, struktur dan hubungan.
- 4) Siswa menyadari kapan/apa teknologi dan informasi yang diperlukan, dimana diperlukan dan diperoleh dan mampu menilai, menggunakan, dan berbagai informasi dengan yang lain.
- 5) Siswa dapat memahami dan menghargai dunia fisik, makhluk hidup, dan teknologi, disamping mempunyai pengetahuan dan keterampilan, dan nilai-nilai untuk mengambil keputusan yang tepat.
- 6) Siswa dapat memahami konteks budaya, geografis, dan sejarah serta memiliki pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai untuk berpartisipasi aktif dalam kehidupannya, serta berinteraksi dan berkontribusi dalam masyarakat dan budaya global.
- 7) Siswa dapat memahami dan berpartisipasi dalam kegiatan kreatif di lingkungannya untuk saling menghargai karya artistik, budaya dan intelektual, serta menerapkan nilai-nilai luhur untuk meningkatkan kematangan pribadi menuju masyarakat beradab.
- 8) Siswa dapat menunjukkan kemampuan berpikir secara terarah, berpikir lateral, memperhitungkan peluang dan potensi, serta siap untuk menghadapi berbagai kemungkinan.
- 9) Siswa mampu menunjukkan motivasi dan percaya diri dalam belajar serta mampu bekerja mandiri sekaligus dapat bekerja sama.

c. Kegiatan Belajar Mengajar

Kegiatan belajar mengajar merupakan komponen ketiga dalam kurikulum berbasis kompetensi. Pada bagian ini dimuat beberapa hal yang menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar, yaitu :

- 1) Prinsip-Prinsip Kegiatan Belajar Mengajar
 - a) Berpusat pada siswa. Maksudnya dalam kegiatan belajar mengajar siswa ditempatkan sebagai subjek belajar dengan memperhatikan bakat, minat,

- kemampuan, cara dan strategi belajar mengajar, motivasi belajar, dan latar belakang sosial siswa.
- b) Belajar dengan melakukan. Maksudnya kegiatan belajar mengajar diarahkan untuk memberikan pengalaman nyata dalam kehidupan sehari-hari dan dunia kerja yang terkait dengan penerapan konsep, kaidah dan prinsip disiplin ilmu yang dipelajari.
 - c) Mengembangkan kemampuan sosial. Dengan prinsip ini dimaksudkan agar dalam kegiatan belajar mengajar diarahkan untuk mengembangkan kemampuan mengkomunikasikan gagasan, pemikiran dengan siswa lain dan dengan guru. Mengembangkan saling pengertian dan menyelaraskan pengetahuan dan tindakannya.
 - d) Mengembangkan keingintahuan, imajinasi, dan fitrah bertuhan.
 - e) Mengembangkan keterampilan pemecahan masalah.
 - f) Mengembangkan kreativitas siswa.
 - g) Mengembangkan kemampuan menggunakan ilmu dan teknologi.
 - h) Menumbuhkan kesadaran sebagai warga negara yang baik.
 - i) Belajar sepanjang hayat.
 - j) Perpaduan kompetisi, kerjasama dan solidaritas

2) Prinsip-Prinsip Motivasi dalam Belajar

Untuk meningkatkan motivasi belajar siswa ada beberapa prinsip yang menjadi perhatian guru yaitu : Kebermaknaan, pengetahuan dan keterampilan prasyarat, model, komunikasi terbuka, keaslian dan tugas yang menantang, latihan yang tepat dan aktif, penilaian tugas, kondisi dan konsekuensi yang menyenangkan, keragaman pendekatan, mengembangkan beragam kemampuan, melibatkan sebanyak mungkin indera, keseimbangan pengaturan pengalaman belajar.

3) Pengalaman Belajar Lintas Kurikulum

Pengalaman belajar lintas kurikulum dikembangkan melalui berbagai kegiatan, baik di dalam maupun di luar kelas seperti : Lomba/Kompetisi, perkemahan, bakti sosial, studi banding budaya, penelitian latihan, koperasi siswa, kebun/sawah percobaan dan bengkel siswa.

Selain itu belajar dengan menerapkan kurikulum berbasis kompetensi ditopang oleh : a) Pengelolaan kegiatan belajar mengajar yang berhubungan dengan pengelolaan

ruang kelas, pengelolaan siswa, dan pengelolaan kegiatan belajar mengajar itu sendiri;
b) Penyediaan pengalaman belajar; c) Sumber belajar; d) Profesionalisme guru.

d. Penilaian Berbasis Kelas.

Penilaian berbasis kelas merupakan salah satu komponen dalam kurikulum berbasis kompetensi. Penilaian Berbasis Kelas (PBK) merupakan suatu proses pengumpulan, pelaporan dan penggunaan informasi tentang hasil belajar siswa dengan menerapkan prinsip-prinsip penilaian, pelaksanaan berkelanjutan, bukti-bukti otentik, akurat dan konsisten sebagai akuntabilitas publik.

Penilaian Berbasis Kelas mengacu kepada prinsip-prinsip sebagai berikut : Valid, mendidik, berorientasi pada kompetensi, adil dan objektif, terbuka, berkesinambungan.

5. Implementasi KBK

Sesuai dengan rumusan kurikulum ideal KBK yang tidak lagi menonjolkan isi atau materi pelajaran, akan tetapi menempatkan pengalaman belajar untuk membentuk kemampuan sebagai arah pengembangan kurikulum, maka dalam implementasinya kurikulum lebih menekankan kepada proses belajar. Pengelolaan pembelajaran tidak lagi didesain untuk memberikan sejumlah informasi kepada siswa untuk dicatat dan dihapal, akan tetapi pengelolaan pembelajaran didesain bagaimana siswa dapat menemukan informasi yang dibutuhkan. Dalam konteks “*menemukan*” itulah pembelajaran dapat membekali siswa sejumlah kemampuan atau kompetensi, misalnya kompetensi berpikir, kompetensi bekerja keras, kompetensi mengakses informasi, mencari data dan lain sebagainya. Jadi dengan demikian, implementasi kurikulum berbasis kompetensi, benar-benar menempatkan siswa sebagai subjek belajar atau yang kita kenal dengan *Student Oriented*.

Apa yang dijelaskan di atas sejalan dengan rumusan *Commision on Education for the twenty – first Century* kepada Unesco (1996) bahwa proses pendidikan haruslah menekankan kepada 4 pokok, yaitu (1) *Learning to know*, yang berarti juga *learning to learn*, (2) *Learning to do*, (3) *learning to be*, (4) *learning to live together*.

Learning to know atau *learning to learn* mengandung pengertian bahwa belajar itu pada dasarnya tidak hanya berorientasi kepada produk atau hasil belajar, akan tetapi juga harus berorientasi kepada proses belajar. Dengan proses belajar siswa bukan

hanya sadar akan apa yang harus dipelajari akan tetapi juga memiliki kesadaran dan kemampuan bagaimana cara mempelajari yang harus dipelajari itu. Dengan kemampuan itu memungkinkan proses belajar tidak akan berhenti atau terbatas di sekolah saja, akan tetapi memungkinkan siswa akan secara terus menerus belajar dan belajar. Inilah hakekat belajar sepanjang hayat. Apabila hal ini dimiliki siswa, maka masyarakat belajar (*learning society*) sebagai salah satu tuntutan masyarakat informasi akan terbentuk oleh sebab itu dalam konteks *learning to know* juga bermakna "*learning to think*" atau belajar berpikir, sebab setiap individu akan terus belajar manakala dalam dirinya tumbuh kemampuan dan kemauan untuk berpikir.

Learning to do, mengandung pengertian bahwa belajar itu bukan hanya mendengar dan melihat dengan tujuan akumulasi pengetahuan, akan tetapi belajar untuk berbuat dengan tujuan akhir penguasaan kompetensi. Kita menyadari, penguasaan kompetensi ini sangat diperlukan dalam era persaingan global.

Learning to be, mengandung pengertian bahwa belajar adalah membentuk manusia yang "menjadi dirinya sendiri", dengan kata lain belajar untuk mengaktualisasikan dirinya sendiri sebagai individu dengan kepribadian yang memiliki tanggungjawab sebagai manusia. Dalam pengertian ini juga terkandung makna kesadaran diri sebagai makhluk Allah yang memiliki tanggungjawab sebagai khalifah serta menyadari akan segala kekurangan dan kelebihanannya.

Learning to live together, adalah belajar untuk bekerja sama. Hal ini sangat diperlukan sesuai dengan tuntutan kebutuhan dalam masyarakat global dimana manusia baik secara individual maupun secara kelompok tidak mungkin dapat hidup sendiri atau mengasingkan diri bersama kelompoknya. Dalam konteks ini termasuk juga pembentukan masyarakat demokratis yang memahami dan menyadari akan adanya setiap perbedaan pandangan antara individu.

Keempat pilar yang dirumuskan oleh Komisi Pendidikan UNESCO itu, nampak adanya pergeseran pemaknaan terhadap proses pendidikan, dari sekedar mengetahui informasi menjadi proses mencari dan memanfaatkan informasi. Oleh karena proses pembelajaran diarahkan kepada sejumlah kemampuan, maka keberhasilan pendidikan diukur dari bagaimana siswa mampu melakukan sesuatu sesuai dengan tuntutan kompetensi tersebut. Hal ini berarti, perlu sistem pengendalian mutu lulusan yang dapat mengarahkan kepada pencapaian kemampuan tersebut.

D. KESIMPULAN DAN IMPLIKASI

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil kajian yang telah dipaparkan di atas, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Kurikulum Berbasis Kompetensi merupakan salah satu bentuk kurikulum yang menekankan ketuntasan belajar yang dicerminkan dalam performansi yang merupakan perpaduan ranah afektif, psikomotor dan kognitif.
- a. Kurikulum Berbasis Kompetensi merupakan salah satu alternatif jawaban terhadap tuntutan adanya perubahan berkenaan dengan: Globalisasi, Desentralisasi Pendidikan dan Kebutuhan Diversifikasi Kurikulum, di mana KBK memiliki karakteristik, antara lain:
 - (1) KBK didasarkan hanya pada satu hasil pendidikan dan pelatihan yang spesifik, diungkapkan dengan jelas dalam bentuk kompetensi yang telah dimodifikasi dan pekerjaan yang harus dikerjakan oleh pekerja, dan dilatihkan kepada siswa.
 - (2) KBK menyediakan kegiatan belajar, materi dan media pendidikan yang berkualitas tinggi, dirancang dengan cermat, pengajaran berpusat pada siswa yang dirancang untuk membantu para siswa untuk menguasai setiap unit pengajaran. Materinya disusun agar setiap siswa dapat menyelesaikan program pengajaran sesuai dengan kecepatan belajarnya masing-masing dan dapat mengulang apabila dibutuhkan untuk belajar secara efektif.
 - (3) KBK menyediakan waktu yang cukup bagi siswa untuk sepenuhnya menguasai suatu unit pelajaran, sebelum diijinkan untuk melanjutkan pada unit pelajaran berikutnya.
 - (4) KBK menuntut setiap siswa untuk mempraktikkan penguasaan materi atau kemampuannya untuk setiap unit pelajaran di dalam situasi lingkungan kerja, sebelum mendapatkan nilai atas pencapaian unit pelajaran itu, dan penampilan kerjanya dibandingkan dengan standar tertentu yang telah ditetapkan.
- b. Kurikulum Berbasis Kompetensi mengembangkan empat pilar pendidikan sejagat yaitu: Learning to know, Learning to do, Learning to be dan Learning to live together yang diimplementasikan dalam empat frame work, yaitu: (1) Pengelolaan Kurikulum Berbasis Sekolah, (2) Kurikulum dan Hasil Belajar, (3) Kegiatan Belajar Mengajar, dan (4) Penilaian Berbasis Kelas. Keempat komponen utama ini merupakan suatu kesatuan yang menggambarkan seluruh rangkaian yang perlu dikembangkan dalam pengembangan KBK.

- c. Persoalan kebijakan kurikulum yang akan dipilih, bukan terletak pada pilihan apakah pendekatan *content based* atau *competency based* yang akan digunakan, namun lebih pada *akuntabilitas dan kesinambungan* program kurikulum, dari mulai tataran ide, dokumen, implementasi, dan evaluasi kurikulum yang akan digunakan dalam suatu negara. Di Jepang misalnya, menggunakan pendekatan sentralistik dengan warna subject content yang kental, namun perencanaan dan implementasi kurikulum dilaksanakan secara sangat bertanggungjawab, di tataran makro ataupun di level mikro di sekolah dan kelas. Hasilnya Jepang unggul dalam SDMnya. Dan menjadikan negara Matahari tersebut maju pesat, dengan tidak meninggalkan ciri budayanya.

2. Implikasi

Seperti dijelaskan sebelumnya bahwa, Kurikulum Berbasis Kompetensi memberikan kewenangan kepada daerah (desentralisasi) untuk mengembangkan sendiri silabus yang disesuaikan dengan kondisi masing-masing sekolah di daerah yang bersangkutan. Pemberian wewenang (desentralisasi) dalam mengembangkan sendiri silabus kepada daerah/sekolah memiliki implikasi sebagai berikut :

- a. Pengembangan dan pelaksanaan kurikulum menjadi dinamis dengan pemecahan masalah yang secara langsung dapat ditangani pada tingkat sekolah atau daerah,
- b. Pengelolaan kurikulum sepenuhnya ditangani oleh sekolah sesuai dengan kemampuan dan kebutuhannya,
- c. Pemberdayaan tenaga-tenaga kependidikan yang potensial di daerah untuk dilibatkan dalam penyusunan silabus, pelaksanaan, dan penilaiannya,
- d. Pemanfaatan sumber-sumber daya pendidikan lainnya yang terdapat di daerah yang bersangkutan untuk penyusunan silabus,
- e. Penggunaan sumber-sumber informasi lain termasuk multimedia yang bermanfaat untuk memperkaya penyusunan silabus dan pelaksanaannya,
- f. Pembentukan tim pengembang kurikulum dan jaringan kurikulum,
- g. Pengembangan sistem informasi kurikulum melalui WEB.

DAFTAR PUSTAKA

- Ariyanto, Totok. (2002). *Kurikulum Berbasis Kompetensi* [Online]. <http://www.suamamerdeka.com/harian/0202/04/kha2.htm> [4 Februari 2002].
- . (1999). *Potret Kurikulum 1994*. Jakarta: Balibang-Depdiknas.
- Brady, Laury. (1990). *Curriculum Development*. New York, London : Prentice Hall.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. (1992). *Undang-undang Nomor Tahun 1989 Tentang Sistem Pendidikan nasional*. Jakarta : Depdikbud.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. (1992). *Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1990 Tentang Pendidikan Dasar*. Jakarta : Depdikbud.
- Depdiknas. (2000). *Kewenangan Bidang Pendidikan dan Kebudayaan di Tingkat Propinsi*.
- . (2000). *Kewenangan Bidang Pendidikan dan Kebudayaan di Tingkat Kabupaten/Kota*.
- . (2001). *Kurikulum Berbasis Kompetensi: Kebijakan Umum Pendidikan Dasar dan Menengah*, Jakarta; Puskur Balitbang Depdiknas.
- Djojonegoro, Wardiman. (1996). *Visi dan Strategi Pembangunan Pendidikan Untuk Tahun 2020 Tuntutan Terhadap Kualitas*. Ceramah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada Konvensi Nasional Pendidikan Indonesia III di Ujung Pandang, 4-7 Maret 1996.
- Hamijoyo, Santoso S. (1974). *Pembaharuan Pendidikan*. Bandung: IKIP Bandung.
- Hauston, Robert W. and Howsam Robert B. (1972). *Competency Based Teacher Education*. Chicago : Science Research Associates Inc.
- IKA IKIP Bandung. (1998). "Reformasi Pendidikan" *Pikiran Mimbar Pendidikan* No. 2 Tahun XVIII.
- Jalal, Fasli dan Dedi Supriadi. (2001). *Reformasi Pendidikan Dalam Konteks Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Adicita.
- Jasin, Anwar. (1987). *Pembaharuan Kurikulum Sekolah Dasar*. Jakarta : Balai Pustaka
- Misbach. (2000). *Prospek Pengelolaan Pendidikan Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah. Seminar Pendidikan-UPI. 20 Oktober 2000*.
- Nasution, S (1987). *Pengembangan Kurikulum*. Bandung: Alumni.
- NIER. (1999). *An International Comparative Study of School Curriculum*. Tokyo.
- Pusat Pengembangan Kurikulum dan Sarana Pendidikan Balitbang Pendidikan dan Kebudayaan Depdiknas. (1999). *Hasil Evaluasi Kurikulum 1994 Sekolah Dasar*.

Pusat Kurikulum. (2002). *Framework Kurikulum dan Hasil Belajar*, Jakarta; Puskur Depdiknas.

Rahmina, Iim. (2002). *Kurikulum Berbasis Kompetensi*. [Online]. <http://www.pikiran-rakyat.com/prcetak/032002/14/0802.htm> [22 Mei 2002].

Redaktur Sinar Grafika (ed). (2001). *Propenas 2000-2004: UU No. 25 tentang Program Pembangunan Nasional Tahun 2000-2004*. Jakarta: Penerbit Sinar Grafika.